

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, SANKSI
PAJAK, DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama
Salatiga)**



PUBLIKASI ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

**CLARESSA AYU AMANDA NOZA
B200100183**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama
Salatiga)**

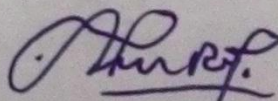
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Claressa Ayu Amanda Noza
B200100183

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. M. Abdul Aris, M. Si
NIK. 565/0601016401

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

“PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, SAKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Salatiga)”

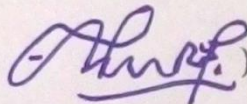
Oleh:

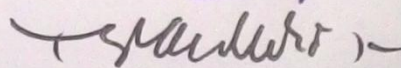
Claressa Ayu Amanda Noza
B200100183

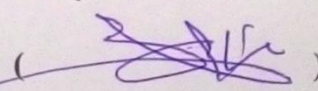
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 23 April 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Drs. M. Abdul Aris, M.Si**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M., Ak**
(Anggota II Dewan Penguji)

()

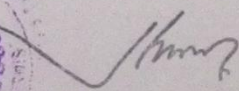
()

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Triyono, S. E, M. Si
NIK. 642/0627016801

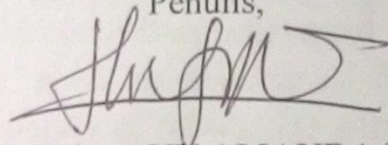
PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, April 2016

Penulis,



CLARESSA AYU AMANDA NOZA

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, SANKSI
PAJAK, DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM**

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga)

Claressa Ayu Amanda Noza
Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta
ayubangetz@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 pada tingkat kepatuhan pajak UMKM (studi empiris pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 85 wajib pajak. Alat analisis yang digunakan meliputi uji kualitas pengumpulan data, uji asumsi klasik, uji ketepatan model (goodness of fit), koefisien determinasi R^2 , dan pengujian hipotesis (statistik t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perubahan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak, (2) kemudahan membayar pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, (3) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, dan (4) sosialisasi PP 46 tahun 2013 memiliki dampak yang signifikan terhadap pajak kepatuhan membayar.

Kata kunci: Pengaruh pajak dari perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, sosialisasi PP nomor 46 tahun 2013, kepatuhan pajak, UMKM.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of changes in rates, the ease of paying taxes, tax penalties, and dissemination of government regulation number 46 of 2013 on the level of tax compliance SMEs (empirical study on SMEs taxpayers listed in KPP Pratama Salatiga). This study uses a quantitative method using primary and secondary data obtained from questionnaires. The population in this study is the taxpayer SMEs listed on STO Salatiga. The number of samples in this study were 85 taxpayers. The analytical tool used include test the quality of data collection, the classic assumption test, test the accuracy of the model (goodness of fit), the coefficient of determination R^2 , and hypothesis testing (statistical t-test). The results showed that: (1) changes significantly influence adherence rates to pay taxes, (2) ease of paying taxes significantly influence compliance to pay taxes. (3) tax penalties significantly influence compliance to pay taxes. (4) dissemination PP number 46 of 2013 have a significant effect on adherence pay taxes.

Keywords: *tax effect of changes in rates, the ease of paying taxes, tax penalties, socialization PP number 46 of 2013, tax compliance, SMEs.*

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan implementasi administrasi perpajakan modern. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Masyarakat Transparansi Internasional memperlihatkan reformasi birokrasi Dirjen Pajak dinilai berhasil. Indikator keberhasilan reformasi birokrasi Dirjen Pajak tersebut adalah mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan, penilaian positif atas pelayanan dari masyarakat wajib pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dalam sejarah perpajakan nasional dan secara nyata telah membukukan jumlah wajib pajak orang pribadi menjadi 12 juta (Rosdiana, 2012).

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak) untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (Norsain dan Yasid, 2014). Dengan berorientasi pada tujuan diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong meningkatkan kemauan wajib pajak pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Untuk tercapainya tujuan tersebut, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada wajib pajak pelaku UMKM mengenai PP No.46 Tahun 2013, serta ketegasan sanksi perpajakan. Menurut Tiong (2014) bahwa sosialisasi Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemauan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ramadiansyah *et.al* (2014) juga mengemukakan bahwa tingginya sanksi perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Norsain dan Yasid (2014) melakukan penelitian mengenai perubahan tarif, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 terhadap persepsi wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan persepsi wajib pajak pelaku UMKM. Hal senada juga disampaikan oleh Ibrahim (2013) yang dalam penelitiannya mengenai pengenaan PPh final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebuah konsep kesederhanaan pengenaan PPh untuk meningkatkan *voluntary tax compliance*, yang menunjukkan bahwa penerapan PP 46/2013, tidak hanya mempunyai tujuan *outcomes* utama berupa peningkatan *voluntary tax compliance*, yang secara tidak langsung juga meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Namun dengan upaya penyederhanaan pengenaan PPh UMKM untuk mendorong *voluntary tax compliance*, juga bertujuan untuk mendorong UMKM terlepas dari *informal trap*, yang selama ini banyak dialami UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

II. LANDASAN TEORI

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008:177).

Alasan pemilihan teori ini adalah lingkungan wajib pajak yang memoderasi perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya sehingga teori atribusi dianggap cocok karena menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa.

Perubahan Tarif Pajak

PP No.46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak bagi sektor UMKM. Sektor UMKM akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet. Selain itu, mereka menjadi wajib memiliki NPWP. Dengan begitu, seluruh aktivitas ekonomi UMKM bakal terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sejak 1 Juli 2013 tersebut setiap UMKM akan menyeter 1% ke kas negara dari omzetnya tidak peduli untung atau rugi.

Kemudahan Membayar Pajak

Definisi kemudahan dalam KBBI adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha. Kemudahan membayar pajak berarti sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar melunasi utang pajak. PP No.46 tahun 2013 memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (www.hukumonline.com)

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sosialisasi PP No. 46

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan (sosialisasi) Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus

dilakukan. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar (Tiong, 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustiyaningsih, 2011). Menurut James et al dalam Anggraeni et al (2013) yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pajak 1% dari penjualan. Pajak penghasilan ini dikenai pajak penghasilan final khusus bagi wajib pajak pelaku UMKM. Norsain dan Yasid (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No.46 tahun 2013 dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H1 : Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Pengaruh kemudahan membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Dengan memperhatikan karakteristik dari UMKM yang belum mampu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, maka kebijakan yang diambil adalah pemberian kemudahan dan penyederhaan penghitungan PPh. Model kemudahan dan penyederhaan yang diambil adalah dengan menerapkan PP No. 46 tahun 2013 untuk wajib pajak UMKM (Ibrahim, 2013). Norsain dan Yasid (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No.46 tahun 2013 dapat meningkatkan kemauan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H2 : Kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Menurut Mardiasmo (2011:47) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Arum dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Pengaruh sosialisasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu: kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar (Tiong, 2014). Norsain dan Yasid (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No. 46 tahun 2013 dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H4 : Sosialisasi PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dengan penyebaran kuesioner. Data sekunder data yang berupa daftar responden yang diperoleh dari dokumentasi KPP Pratama Salatiga. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel secara tidak acak dengan metode *purposive sampling*. Dalam menentukan jumlah kuesioner yang disebar peneliti menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = Populasi

n = Sampel

e = Presentasi kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir

$$n = \frac{1080}{1 + 1080 (10\%)^2}$$

$$n = 92$$

Rumus di atas menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini 92 responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variable Dependen

Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berate tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Tirada (2013) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau

organisasi untuk berbuat sesuai aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan.

Variable Independen

1. Perubahan Tarif Pajak

Terbitnya kebijakan baru Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pajak 1% dari penjualan. Penentuan tarif pajak tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

2. Kemudahan Membayar Pajak

Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (www.hukumonline.com).

3. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

4. Sosialisasi PP No.46 Tahun 2013

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar (Tiong, 2014).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda. Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan model penelitian, sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 PT + \beta_2 KMP + \beta_3 SP + \beta_4 S + \varepsilon$$

Keterangan:

KP : kepatuhan pajak

PT : perubahan tarif

KMP : kemudahan membayar pajak

SP : sanksi pajak

S : sosialisasi pajak

α : Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$: koefisien regresi

ε : error term

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Berganda

	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	1.543	1.601	0,113
Perubahan tarif pajak	0,949	3.646	0,000
Kemudahan membayar pajak	0,985	4.731	0,000
Sanksi pajak	0,668	2.452	0,016
Sosialisasi PP No 46	1.158	9.013	0,000
R ²	0,775		
Uji F	82.030		0,00

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel tingkat perubahan tarif pajak sebesar 3,646 > 1,995, dan nilai sig sebesar 0,000 < 5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norsain dan Yasid (2014) yang menemukan hasil bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berubah ke arah positif.

Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

Kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Dibuktikan dengan hasil t hitung untuk variabel kemudahan membayar pajak sebesar 4,731 > 1,995, dan nilai sig sebesar 0,000 < 5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norsain dan Yasid (2014) yang menemukan hasil bahwa dengan adanya kemudahan cara membayar dan menghitung hutang pajak, dapat meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya ke arah yang lebih baik.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Dibuktikan dengan hasil t hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar 2,452 < 1,995, dan nilai sig sebesar 0,016 < 5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiong (2014) dan Sumiatun (2014) yang memperoleh hasil ketegasan sanksi dan sosialisasi Pemerintah atas PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun dari Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan sosialisasi dan mempertegas peraturan pelaksanaan PP

No.46 tahun 2013 dalam upaya memberikan informasi kepada wajib pajak tetapi bagi wajib pajak masih sangat minim informasi tersebut terkait pelaksanaan PP 46 tahun 2013.

Pengaruh Sosialisasi PP No. 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

Sosialisasi PP No 46 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Dibuktikan dengan hasil t hitung untuk variabel sosialisasi PP No 46 sebesar $9,013 > 1,995$, dan nilai sig sebesar $0,000 < 5\%$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norsain dan Yasid (2014) yang menjelaskan bahwa sosialisasi sangat diperlukan untuk mengomunikasikan peraturan baru yang ditetapkan, supaya wajib pajak paham tujuan dari ditetapkannya peraturan tersebut, sehingga wajib pajak tidak salah persepsi atas peraturan baru yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan peraturan tersebut dengan baik.

Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap 85 responden wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga, yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut: perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP No.46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Salatiga saja, dan UMKM yang belum terdaftar tidak termasuk dalam sampel, sehingga belum mewakili secara keseluruhan.
2. Penelitian ini tidak mengelompokkan UMKM kedalam kelompok kecil, menengah dengan berdasarkan pada laba/omzet yang diperoleh masing-masing UMKM, jadi kemungkinan adanya bias asumsi pada data sampel penelitian.

Saran

1. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dalam menentukan sampel penelitian tidak hanya satu KPP saja, agar bisa membandingkan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat.
3. Dalam penelitian berikutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian dengan menambah sampel tidak hanya UMKM yang terdaftar di KPP, namun UMKM yang belum terdaftar juga disertakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Yuningtyas; Naili Farida; Saryadi. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social and Politic*
- Arum, Puspa dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1. No.1. PP 1-8
- Ghozali, H. Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ibrahim, Syarif. 2013. Fiskal Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara - Badan Kebijakan. (on line)
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UM M_PKPN.pdf. Diakses tanggal 15 Maret 2015 Pukul 12.44
- Norsain dan Abu Yasid. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. *Jurnal PERFORMANCE Bisnis dan Akuntansi*. Vol.IV. No.2
- Ramandiansyah, Dimas; Nengah Sudjana; Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal e-Perpajakan*, Vol.1. No.1
- Rosdiana, Haula, dkk. 2012. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*. No.02. ISSN 0854-1981
- Tiong, Ka. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Pp No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Wilayah DKI Mega Glodok Kemayoran). Tesis Pascasarjana Program Magister Akuntansi. Universitas Mercu Buana
- Widarjono, Agus. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UM M_PKPN.pdf.